

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (diartikan oleh R. Santoso Brotodiharjo 1991:2) : “Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1990:5) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets (1951) yang diterjemahkan oleh Diaz Priantara (2012:2) : “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam karangannya yang berjudul “Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong” (1964:102), “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi pengeluaran produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Harjo, 2013, h. 4).

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Harjo (2013, h. 7) menyatakan bahwa pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana dari masyarakat ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi anggaran disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Negara, berdasarkan fungsi ini pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai kepentingannya memungut pajak dari penduduknya melalui berbagai jenis pajak yang ditetapkan atas berbagai sendi kehidupan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi tambahan karena fungsi ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi *budgetair*. Dengan adanya fungsi ini diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu Negara.

Terdapat dua penerapan fungsi ini, yakni penerapan fungsi secara positif dan penerapan fungsi secara negatif. Yang dimaksud penerapan fungsi *regulerend* dengan cara positif adalah cara mengatur dengan tujuan memberi dorongan ke arah suatu tujuan positif tertentu dengan maksud untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Sedangkan fungsi mengatur dengan cara yang bersifat negatif adalah cara mengatur yang dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tertentu.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Harjo (2013, h. 12) pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pajak Ditinjau Berdasarkan Golongannya
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan dan pajak ini dipungut secara periodik atau berkala. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan/digeserkan kepada orang atau pihak lain. Pajak ini dipungut secara insidental yakni pada saat terjadi peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak Ditinjau Berdasarkan Wewenang/Lembaga Pemungut Pajak
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan). Hasil pemungutan pajak pusat ini akan dialokasikan ke dalam Anggaran Negara yang dibuat oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara untuk kesejahteraan rakyat. Contoh: PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparatur pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir.

3. Pajak Ditinjau Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan Wajib Pajak dimana penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan Wajib Pajak.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak memperhatikan kondisi objek pajak dimana peristiwa atau keadaan tadi akan menimbulkan kewajiban membayar pajak.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, h. 7) ada 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Beban Pajak Tangguhan

Menurut Hery (2016, h. 5), Beban pajak penghasilan adalah total jumlah pajak yang dikenakan atas seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan sepanjang satu tahun. Beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan pada umumnya timbul dari dua kewajiban, yaitu:

1. Kewajiban pajak saat ini, yang terhutang sebagai konsekuensi dari besarnya laba kena pajak untuk periode berjalan, dan
2. Kewajiban pajak yang ditangguhkan, sebagai konsekuensi dari besarnya jumlah kena pajak di masa yang akan datang.

Pajak tangguhan adalah perkiraan pajak penghasilan atas pendapatan yang sudah terjadi (menurut akuntansi), tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan belum terhutang pajak (karena belum ada penerimaan kas); atau dengan kata lain bahwa kewajiban pajak ini secara legal belum ada, dan baru akan resmi kena pajak atau memerlukan pembayaran pajak di periode mendatang (oleh sebab itu dikatakan sebagai kewajiban yang ditangguhkan).

Menurut PSAK No. 46 (2016), Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode". Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Beda temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa :

- a. Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

2.3 Perencanaan Pajak

2.3.1 Definisi Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2016, h. 18), *Tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan

memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Perencanaan perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perpajakan. *Tax planning* dapat diterapkan ketika wajib pajak akan memulai kegiatan usahanya sampai penutupan usaha (likuidasi), jika benar-benar terjadi. Perencanaan perpajakan dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, pemilihan lokasi usaha); saat menjalankan usaha (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi dan perpajakan, tanggung jawab terhadap *stakeholders*); saat akan menutup usaha (restrukturisasi usaha/perusahaan, likuidasi, merger, pemekaran, dan sebagainya) (Pohan, 2016, h.9).

Sedangkan menurut Ilyas (2013, h. 15), Perencanaan pajak adalah proses mempertimbangkan seluruh faktor pemajakan yang relevan dengan tujuan untuk menentukan kapan, bagaimana, oleh dan dengan siapa melakukan transaksi, operasional, dan hubungan usaha dengan tujuan untuk menjaga beban pajak yang dikenakan atas suatu peristiwa ekonomi tersebut (obyek) dan orang (subyek) yang dapat dikenakan pajak seminimal mungkin tetapi tetap dapat mencapai tujuan bisnis, pribadi dan tujuan lain yang diinginkan.

2.3.2 Motivasi Perencanaan Pajak

Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun ilegal (Pohan, 2016, h. 18), adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)
2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)
3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)
4. Risiko deteksi (*Probability of detection*)
5. Besarnya denda (*Size of penalty*)

6. Moral masyarakat

Sedangkan menurut Suandy (2013, h. 10), motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-Undang perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

2.3.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2016, h. 21), secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Menaati segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.3.4 Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Pohan, 2016, h. 20).

2.3.5 Tahapan Perencanaan Pajak

Agar *tax plan* sesuai harapan, Barry Spitz (1983:86) dalam Pohan (2016, h. 27) mengemukakan tahap-tahapan yang harus ditempuh, yakni:

1. *Analysis of the existing data base* (Melakukan analisis data base yang ada)

Penjabaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

Data base yang harus dianalisis antara lain meliputi:

- a. Apakah terdapat kejanggalan atau komponen-komponen yang berbeda:
 - 1) Dalam Pembayaran dan Pelaporan Pajak bulanan PPh Pasal 21, PPh Badan, dan PPN.
 - 2) Dalam Pemotongan dan Pelaporan Pajak bulanan (PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4(2))
 - 3) Dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan PPh Badan, dengan senantiasa mengaitkannya atau merekonsiliasikannya dengan pembukuan perusahaan.
- b. Analisis implikasi fiskal atas suatu proyek yang sedang ditangani atau yang akan datang.

2. *Design of one or more possible tax plans* (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak).

Pembentukan pola-pola perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan *tax plan* mana yang *applicable* dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan. Contoh:

- a. Pemilihan bentuk usaha. Pada saat seorang investor akan memulai suatu usaha, dia akan memilih bentuk usaha apa saja yang bisa memberikan hasil akhir (*net profit after tax*) yang lebih besar buat dia, apakah perseroan terbatas (PT), usaha perorangan, atau firma/CV.
- b. Bagi badan usaha yang telah *go international* atau perusahaan multinasional, *treaty shopping* dapat dilakukan oleh para pengusaha dengan memanfaatkan tarif pajak dan fasilitas perpajakan yang terdapat dalam berbagai *tax treaty* yang telah disetujui oleh masing-masing kepala negara, yang lebih menguntungkan mereka.

3. *Evaluating a tax plan* (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak)

Tahap evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak yang bermaksud untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengawasan pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*).

Dengan memperhatikan contoh di atas, pengendalian pajak dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan *review* atas pengkreditan Pajak Masukan, apakah Faktur Pajak yang diterima memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar.
- b. Melakukan *review* apakah Faktur Pajak telah dibuat dan dilaporkan tepat waktu.
- c. Melakukan *review* apakah retur yang telah dicatat dan dilaporkan telah benar, baik secara formal maupun materi.

Dalam tahap evaluasi perencanaan pajak, kita misalnya, dapat mengimplementasikan program *Tax Diagnostic Review* (TDR), semacam program untuk menangani kepatuhan wajib pajak yang dapat disusun sendiri oleh *tax manager* atau *tax consultant* dari masing-masing perusahaan. Setelah menetapkan alternatif mana yang akan digunakan, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil yang akan diperoleh dari suatu perencanaan pajak.

4. *Debugging the tax plan* (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak)

Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*tax plan*) adalah bentuk pengawasan refresif. Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan di *review* terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya. Terkadang ada hal yang menyebabkan suatu rencana pajak memiliki kekurangan, baik yang disebabkan adanya perubahan peraturan perpajakan atau faktor lainnya, sehingga rencana pajak tersebut harus dikaji ulang dan bila ditemukan kelemahan harus segera dimodifikasi untuk keberhasilan *tax plan* tersebut agar rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

5. *Updating the tax plan* (Memutakhirkan rencana pajak)

Dalam melakukan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam *tax plan*. Hal tersebut harus terus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Dengan pemutakhiran, diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

2.4 Manajemen Laba

2.4.1 Definisi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2014, h. 6), Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Menurut Yulianti (2005) dalam Amanda (2015, h. 73), *Earnings management* dalam arti sempit didefinisikan sebagai perilaku dimana manajer bermain dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya *earnings*. Sedangkan dalam arti luas *earnings management* didefinisikan sebagai tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang.

Definisi manajemen laba menurut Rosenzweig dan Fischer (1994) dalam Astutik (2016, h. 5) adalah tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.

Sedangkan definisi manajemen laba menurut Belkaoui (2007:201) dalam Fitriany (2016, h. 1154) merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

2.4.2 Tujuan Manajemen Laba

Tujuan yang ingin dicapai oleh manajer dengan manajemen laba adalah (Sulistyanto, 2014, h. 159) :

1. Menyesatkan pihak lain yang menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan-keputusan strategis. Oleh sebab itu, apabila dasar dan informasi yang dipakai untuk membuat keputusan telah direayasa dan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental perusahaan maka mudah dimengerti jika keputusan-keputusan yang dibuat *stakeholder* menjadi tidak tepat.
2. Manajer dapat memperoleh manfaat pribadi dari kesalahan yang dibuat *stakeholder*. Semakin tinggi kesalahan yang dibuat *stakeholder* maka semakin tinggi pula manfaat yang akan diterima oleh manajer. Oleh sebab itu, manajemen laba hanya menguntungkan satu pihak tertentu, yaitu manajer perusahaan dan kelompoknya, dan merugikan pihak lain, baik pemilik, investor, kreditur, maupun pemerintah. Bahkan, dampak *multiplier* rekayasa informasi ini tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak itu, namun juga oleh

publik yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan perusahaan. Ini artinya manajemen laba tidak hanya mempengaruhi dan merugikan perekonomian mikro maupun juga mempengaruhi dan merugikan perekonomian makro, bahkan perekonomian global.

2.4.3 Pola Manajemen Laba

Scott (2003:383) dikutip dari Santana (2016, h. 1565) menyebutkan bahwa pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Taking a Bath*. Pola ini terjadi pada saat reorganisasi, dimana manajemen harus melaporkan kerugian dalam jumlah besar agar dapat meningkatkan laba dimasa yang akan datang.
2. *Income Minimization*. Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi akan melakukan pola ini, sehingga apabila laba pada periode mendatang diperkirakan akan turun drastis, maka dapat diatasi dengan mengambil laba dari periode sebelumnya.
3. *Income Maximization*. Pola ini dilakukan pada saat laba perusahaan mengalami penurunan. Perusahaan yang melaporkan *net income* yang tinggi berharap akan memperoleh bonus yang lebih besar.
4. *Income Smoothing*. Pola ini dilakukan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.4.4 Motivasi Manajemen Laba

Scott (2000) dalam Aditama (2014, h. 37-38) mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*)

Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang

harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*)

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya.

3. Motivasi Politik (*Political Motivation*)

Perusahaan besar dan *industry strategic* akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan *visibility*-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

4. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*)

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik.

6. *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang pertama kali akan *go public* belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

7. Pemberian Informasi Kepada Investor (*Communicate Information to Investors*)

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat

laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Christina Ranty Sumomba dan YB. Sigit Hutomo (Jurnal Kinerja, Volume 16, No. 2, Th. 2012, Hal. 103-115)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Beban pajak tangguhan tahun 2008 berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan tahun 2009 tidak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 2) Perencanaan pajak tahun 2008 dan tahun 2009 berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 3) Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak

			tahun 2008 dan tahun 2009 secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Yana Ulfah (Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, Th. 2013)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tanggihan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap probabilitas praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2009-2011 pada tingkat signifikansi kurang dari 5% (pada 0,001%), sedangkan ukuran perusahaan dan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan praktik manajemen laba.
3.	Budi Setyawan dan Harnovinsah (Jurnal Keberlanjutan, Vol.1, No.1, Th. 2016)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan beban pajak tanggihan dan perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan

		Komponen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	terhadap manajemen laba.
4.	Ratna Eka Puji Astutik dan Titik Mildawati (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, No. 3. Th. 2016)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman yang mengindikasikan bahwa model penelitian layak untuk penelitian berikutnya. Hubungan antara model yang digunakan dalam penelitian tersebut terhadap manajemen laba memiliki hubungan yang erat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan masing-masing memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang

			makanan dan minuman.
5.	A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G Dharma Suputra (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 20, No. 3, Th. 2017, Hal. 2045-2072)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tanggihan berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.
6.	Lucy Citra Fitriany (Jurnal JOM Fekon, Vol. 3, No. 1, Th. 2016)	Pengaruh Aset Pajak Tanggihan, Beban Pajak Tanggihan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)	Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa : 1) Aset pajak tanggihan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2) Beban pajak tanggihan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 3) Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
7.	Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (Jurnal Modus, Vol. 26, No. 1, Th. 2014, Hal. 33-50)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa	Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non

		Efek Indonesia Tahun 2009-2012	manufaktur yang terdaftar di BEI.
8.	Felicia Amanda dan Meiriska Febrianti (Jurnal Ultima Accounting, Vol. 7, No. 1, Th. 2015)	Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, dan Basis AkruaI Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)	Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Beban pajak kini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2) Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 3) Basis akrual tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 4) Beban pajak kini, beban pajak tangguhan, dan basis akrual secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
9.	Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14, No. 3, Th. 2016, Hal. 1555-1583)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010)	Hasil pengujian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan menunjukkan hasil tidak berpengaruh.

10.	Taufik Budiman (Jurnal Ekonomi, Th. 2014)	Pengaruh Beban Pajak Tanggungan dan Akrual Terhadap Indikasi Adanya Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)	Hasil pengujian menunjukkan bahwa : 1) Beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap indikasi adanya praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 2) Akrual berpengaruh terhadap indikasi adanya praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
11.	Ardi Hamzah (Jurnal Neo-Bis, Vol. 8, No. 1, Th. 2014)	Deteksi Manajemen Laba Melalui Beban Pajak Tanggungan, Akrual dan Arus Kas Operasi (Studi Pada Perusahaan <i>Real Estate</i> dan <i>Property</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Beban pajak tanggungan berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba pada saat menghindari pelaporan penurunan laba. 2) Akrual dan arus kas operasi tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba pada saat menghindari pelaporan penurunan laba. 3) Beban pajak tanggungan, akrual dan arus kas operasi secara simultan tidak

			berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba pada saat menghindari pelaporan penurunan laba.
12.	Anjar Putri Utami dan Abdul Malik (Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2, Tahun 2015, Hal. 44-64)	Pengaruh <i>Discretionary Accrual</i> , Beban Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Bidang Makanan dan Minuman Bursa Efek Indonesia 2009-2013)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) <i>Discretionary accrual</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2) Beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 3) Beban pajak kini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 4) <i>Discretionary accrual</i> , beban pajak tangguhan, dan beban pajak kini secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.6 Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba seringkali dikaitkan dengan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang berguna untuk

kepentingan bersama. Pajak dipungut dari rakyat ke kas negara oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak menjadi salah satu unsur pengurang laba, dimana berkurangnya laba dapat mempengaruhi pemikiran investor untuk berinvestasi di perusahaan. Oleh karena itu manajemen berusaha untuk mengoptimalkan laba bersih perusahaan. Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen dalam melakukan manajemen laba dalam proses perencanaan pajak. Selain itu, beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

2.6.1 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian.

Kewajiban pajak tangguhan (PSAK No. 46, 2016) adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Beda temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya.

Kewajiban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumomba (2012) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba. Dalam penelitian Ulfah (2013) juga menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hal serupa juga terjadi dalam penelitian Budiman (2014) bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap indikasi adanya praktik manajemen laba. Sedangkan dalam penelitian Amanda (2015), Fitriany (2016), dan Setyawan

(2016) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.6.2 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungannya. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) mempunyai hak untuk menerima pembayaran pajak perusahaan itu. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi *agent* meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Sulistyanto, 2014, h. 95).

Pada teori akuntansi positif dalam hipotesis ketiga yaitu *The Political Cost Hypothesis* (Sulistyanto, 2014, h. 63) juga menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Pengelola akan mempermainkan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan (Suandy, 2013, h. 5).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santana (2016) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, dimana semakin tinggi perencanaan

pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditama (2014) menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI.

2.6.3 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sering direkayasa oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau dikenal dengan manajemen laba. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba sering sekali dikaitkan dengan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak. Beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen.

Artinya semakin besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Serta semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi pula kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan.

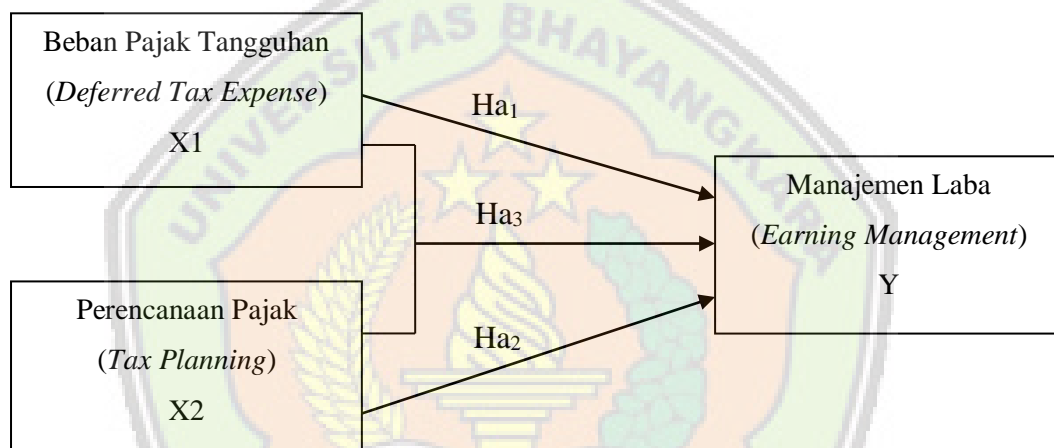
Begitupun dengan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan.

Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah

dari laba bersih perusahaan. Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba dalam proses perencanaan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumomba (2012) dan Negara (2017) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2016) dan Utami (2015) menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.

Dari penjelasan di atas dapat dibuat suatu kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis

Tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2010, h. 93). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Ho₁ : Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Ha₁ : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba

2. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Ho₂ : Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Ha₂ : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

3. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Ho₃ : Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Ha₃ : Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba



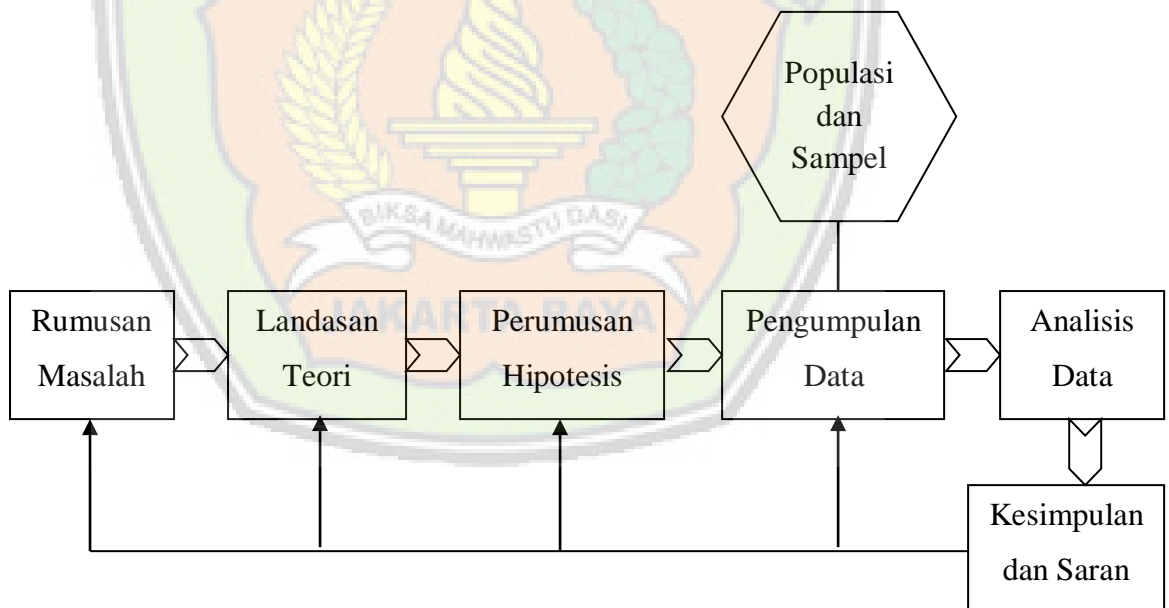
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Kuantitatif ialah desain penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010, h. 13).

3.2 Tahapan Penelitian



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Sugiyono (2010, h.46)

Tahapan dalam penelitian ini dimulai dengan pembuatan rumusan masalah yang pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan dapat memandu peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Peneliti mengumpulkan teori yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab

rumusan masalah penelitian, jawaban dari rumusan masalah yang menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis atau diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara, kemudian dibuktikan kebenarannya secara empiris/nyata, maka peneliti melakukan pengumpulan data pada populasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Bila terlalu banyak, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik deskriptif. Data hasil analisis disajikan dan diberikan pembahasan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka peneliti memberikan kesimpulan dan saran (Sugiyono, 2010, h. 47).

3.3 Model Konseptual

Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu.

Salah satu tindakan praktik manajemen laba adalah dengan melakukan tindakan untuk mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya, dimana hal ini mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan (Phillips et al., 2003) dalam Sumomba (2012). Selain dengan melakukan penundaan pengakuan biaya, perusahaan juga berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak.

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Beban Pajak Tangguhan (X1)

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Phillips et al., (2003) dalam Sumomba (2012) menyatakan bahwa rumus besaran *deferred tax expense* (beban pajak tangguhan) adalah sebagai berikut :

$$BBPT_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan perusahaan } i \text{ pada tahun } t}{\text{Total aktiva pada akhir tahun } t-1}$$

Keterangan :

$BBPT_{it}$: Besaran Beban Pajak Tangguhan perusahaan i pada tahun t .

2. Perencanaan Pajak (X2)

Perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Rumus *tax retention rate* adalah (Wild et al., 2004) dalam Sumomba (2012) :

$$TRR = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$$

Keterangan :

TRR : *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t .

$Net Income_{it}$: Laba bersih perusahaan i pada tahun t .

$Pretax Income (EBIT)_{it}$: Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t .

3. Manajemen Laba (Y)

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk merekayasa informasi dalam laporan keuangan (laba rugi) untuk

kepentingan-kepentingan tertentu. Berdasarkan penelitian Phillips et al., (2003) dalam Sumomba (2012), rumus untuk variabel manajemen laba yang diukur dengan pendekatan distribusi laba adalah :

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan :

ΔE : Distribusi laba. Bila nilai E adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai E adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian. Pada penelitian ini, nilai dari E tersebut hanya digunakan sebagai informasi tambahan pada hasil statistik deskriptif.

E_{it} : Laba bersih perusahaan i pada tahun t.

E_{it-1} : Laba bersih perusahaan i pada tahun t-1.

MVE_{t-1} : *Market Value of Equity* perusahaan i pada tahun t-1 (menggunakan nilai kapitalisasi pasar). Nilai kapitalisasi diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun t-1.

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi berjudul Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba, maka penulis mengadakan penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Maret - Juli 2018.

3.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa dalam bentuk angka-angka, sebagaimana telah dijelaskan oleh Sugiyono (2010:12) bahwa kuantitatif adalah

data yang berbentuk angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh tidak langsung dari sumber pertama dalam bentuk sudah jadi yang bersifat dokumenter. Data tersebut berupa laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui website resmi www.idx.co.id.

3.7 Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan membuat beberapa kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017, dan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan per 31 Desember yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.
2. Perusahaan manufaktur yang memiliki akun beban pajak tangguhan.
3. Perusahaan manufaktur tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010, h. 206). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data seperti nilai mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi (Priyatno, 2016, h. 9).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal sehingga data layak untuk diuji secara statistik. Dalam penelitian ini untuk menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov Test*, yaitu :

- a. Jika nilai signifikansi (Asymp.sig) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan;
- b. Jika nilai signifikansi (Asymp.sig) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2016, h. 118).

3.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas umumnya dengan melihat nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada hasil regresi linier, dimana :

- a. Jika Tolerance lebih dari 0,1 dan;
- b. VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Priyatno, 2016, h. 129).

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplot* regresi.

Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan melihat *scatterplot* yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi (Priyatno, 2016, h. 131).

3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

- a. $DU < DW < 4-DU$, maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi).
- b. $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$, maka H_0 ditolak (terjadi autokorelasi).
- c. $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, maka tidak ada keputusan yang pasti (Priyatno, 2016, h. 139).

3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda juga untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Priyatno, 2013, h. 116). Persamaan regresi linier berganda adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y : Manajemen Laba (nilai yang diprediksikan)

X₁ : Beban Pajak Tangguhan

- X_2 : Perencanaan Pajak
- a : Nilai konstanta
- b_1 : Koefisien regresi dari beban pajak tanggungan
- b_2 : Koefisien regresi dari perencanaan pajak

3.8.3.1 Uji Koefisien Regresi (b)

Koefisien regresi (b) adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas (X), semakin besar nilai koefisien regresi maka kontribusi perubahan juga semakin besar, dan sebaliknya akan semakin kecil. Kontribusi perubahan variabel bebas (X) juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif (Sunyoto, 2011, h. 9).

3.8.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan sebaliknya apabila nilai yang mendekati 1 (satu) artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013, h. 97).

3.8.4 Uji Hipotesis

3.8.4.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut (Priyatno, 2016, h. 66) :

- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_a ditolak, H_0 diterima
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, H_0 ditolak

Selain dengan berdasarkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} , pengambilan keputusan pada uji t juga dilakukan berdasarkan signifikansi, yaitu :

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak, H_0 diterima
- b. Jika signifikansi $\leq 0,05$ maka H_a diterima, H_0 ditolak

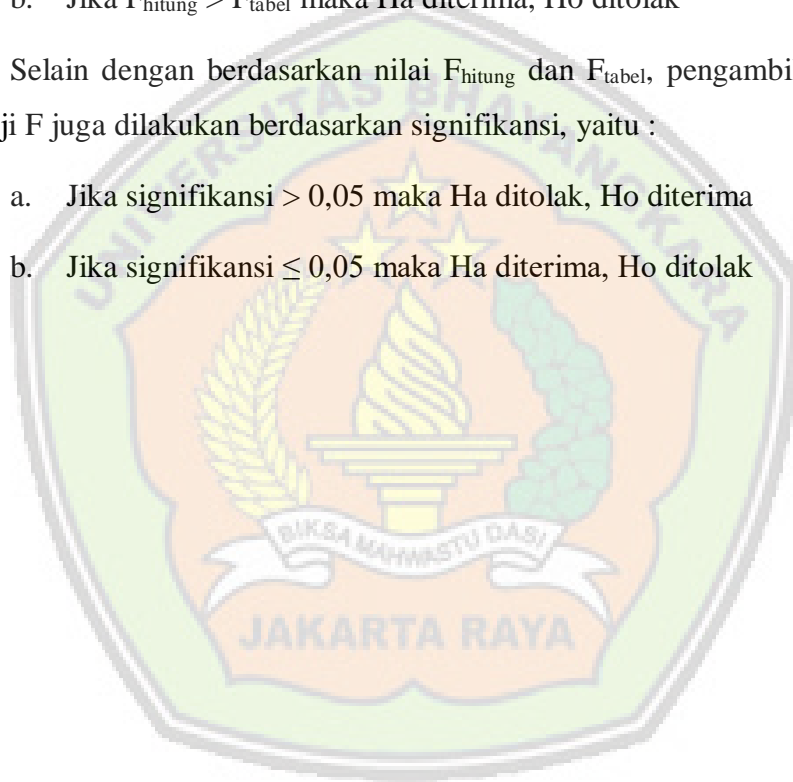
3.8.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan pada uji F adalah sebagai berikut (Priyatno, 2016, h. 63) :

- a. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_a ditolak, H_0 diterima
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima, H_0 ditolak

Selain dengan berdasarkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} , pengambilan keputusan pada uji F juga dilakukan berdasarkan signifikansi, yaitu :

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak, H_0 diterima
- b. Jika signifikansi $\leq 0,05$ maka H_a diterima, H_0 ditolak



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

Desember 1912	Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
1914 – 1918	Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I
1925 – 1942	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
Awal tahun 1939	Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup
1942 – 1952	Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali

	selama Perang Dunia II
1956	Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif
1956 – 1977	Perdagangan di Bursa Efek vakum
10 Agustus 1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama
1977 – 1987	Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal
1987	Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
1988 – 1990	Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat
2 Juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer
Desember 1988	Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal
16 Juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
13 Juli 1992	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

	Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ
22 Mei 1995	Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems)
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996
1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
2000	Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia
2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)
2007	Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
02 Maret 2009	Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG

4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan populasi penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017, penelitian ini menggunakan beberapa sampel perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pada penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang berupa laporan keuangan tahun 2015-2017 yang diperoleh melalui website resmi www.idx.co.id. Berikut ini adalah rincian perolehan sampel perusahaan manufaktur dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis sebagai berikut :

Tabel 4.1**Kriteria Sampel Perusahaan**

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2015-2017	155
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2015-2017	(48)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan dan mengalami kerugian selama periode 2015-2017	(97)
Sampel Penelitian	10

Berdasarkan data perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode 2015 sampai dengan 2017, sehingga total sampel yang akan digunakan sebanyak 30 (3 tahun x 10 perusahaan), berarti sampel dalam penelitian ini telah memenuhi standar sampel. Berikut adalah sampel dalam penelitian ini :

Tabel 4.2**Sampel Penelitian**

No	Kode Emiten	Nama Emiten
1.	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk.
2.	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3.	CINT	PT Chitose Internasional Tbk.
4.	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
5.	EKAD	PT Ekadharna International Tbk.
6.	SKLT	PT Sekar Laut Tbk.

7.	MYOR	PT Mayora Indah Tbk.
8.	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk.
9.	KBLI	PT KMI Wire and Cable Tbk.
10.	WIIM	PT Wismilak Inti Makmur Tbk

4.2 Deskriptif Hasil Penelitian

4.2.1 Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan diperoleh dengan membagi beban pajak tangguhan dengan total aktiva t-1. Besarnya beban pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel adalah sebagai berikut :

$$BBPT_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan perusahaan } i \text{ pada tahun } t}{\text{Total aktiva pada akhir tahun } t-1}$$

Tabel 4.3

Beban Pajak Tangguhan

(dalam rupiah)

Kode Emiten	Tahun	Beban Pajak Tangguhan it	Aset (t-1)	Beban Pajak Tangguhan
AMFG	2015	-10,524,000,000	3,946,125,000,000	-0.00266692
	2016	8,325,000,000	4,270,275,000,000	0.001949523
	2017	-14,933,000,000	5,504,890,000,000	-0.002712679
CEKA	2015	725,133,209	1,284,150,037,341	0.00056468
	2016	38,629,254,581	1,485,826,210,015	0.025998501
	2017	-2,025,480,502	1,425,964,152,418	-0.001420429
CINT	2015	774,388,517	370,186,989,798	0.002091885
	2016	1,659,534,102	382,807,494,765	0.004335166

	2017	-196,486,608	399,336,626,636	-0.000492033
DPNS	2015	519,463,362	268,891,042,610	0.001931873
	2016	796,665,347	274,483,110,371	0.00290242
	2017	475,858,006	296,129,565,784	0.001606925
EKAD	2015	-1,095,079,183	411,726,182,748	-0.002659727
	2016	473,262,392	389,691,595,500	0.001214454
	2017	2,008,487,598	702,508,630,708	0.002859022
SKLT	2015	1,310,568,375	336,932,338,819	0.003889708
	2016	1,876,668,288	377,110,748,359	0.004976438
	2017	391,189,992	568,239,939,951	0.000688424
MYOR	2015	3,825,834,291	10,297,997,020,540	0.000371512
	2016	-18,275,966,677	11,342,715,686,221	-0.001611251
	2017	-19,797,005,919	12,922,421,859,142	-0.001531989
TCID	2015	-260,261,730	1,863,679,837,324	-0.000139649
	2016	-4,898,885,046	2,082,096,848,703	-0.002352861
	2017	9,701,413,281	2,185,101,038,101	0.004439801
KBLI	2015	1,040,196,022	1,340,881,252,563	0.000775756
	2016	31,738,442,144	1,551,799,840,976	0.020452665
	2017	268,570,842	1,871,422,416,044	0.000143512
WIIM	2015	2,005,147,192	488,154,387,359	0.004107609
	2016	1,190,364,134	1,342,700,045,391	0.000886545
	2017	2,538,912,111	1,353,634,132,275	0.001875627

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai beban pajak tangguhan tidak selalu mengalami kenaikan, tetapi ada juga perusahaan yang mengalami penurunan atau kerugian pada nilai beban pajak tangguhannya. Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan nilai beban pajak tangguhan maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang membagi beban pajak tangguhan dengan total aktiva tahun sebelumnya. Hasil dari perhitungan tersebut akan diolah menggunakan SPSS 20.

4.2.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau *tax planning* diperoleh dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004 dalam Sumomba (2012)). Dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini:

$$TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}}$$

Tabel 4.4
Perencanaan Pajak
(dalam rupiah)

Kode Emiten	Tahun	Net Income _{it}	Pretax Income (EBIT) _{it}	Perencanaan Pajak
AMFG	2015	341,346,000,000	464,263,000,000	0.73524274
	2016	260,444,000,000	348,561,000,000	0.747197765
	2017	38,569,000,000	63,589,000,000	0.606535722
CEKA	2015	106,549,446,980	142,271,353,890	0.74891708
	2016	249,697,013,626	285,827,837,455	0.873592355
	2017	107,420,886,839	143,195,939,366	0.75016713
CINT	2015	29,477,807,514	40,762,330,489	0.723162959
	2016	20,619,309,858	28,172,913,292	0.731884191
	2017	29,648,261,092	38,318,872,398	0.773724779
DPNS	2015	9,859,176,172	11,832,026,060	0.833261871
	2016	10,009,391,103	12,288,056,506	0.814562588
	2017	5,963,420,071	7,568,252,565	0.787952043
EKAD	2015	47,040,256,456	66,306,918,116	0.709432104
	2016	90,685,821,530	118,449,029,979	0.765610504

	2017	76,195,665,729	102,649,309,681	0.742291068
SKLT	2015	20,066,791,849	27,376,238,223	0.733000337
	2016	20,646,121,074	25,166,206,536	0.820390671
	2017	22,970,715,348	27,370,565,356	0.839248844
MYOR	2015	1,250,233,128,560	1,640,494,765,801	0.762107356
	2016	1,388,676,127,665	1,845,683,269,238	0.752391351
	2017	1,630,953,830,893	2,186,884,603,474	0.745788702
TCID	2015	544,474,278,014	583,121,947,494	0.933722835
	2016	162,059,596,347	221,475,857,643	0.731725788
	2017	179,126,382,068	243,083,045,787	0.73689377
KBLI	2015	115,371,098,970	150,049,026,298	0.768889354
	2016	334,338,838,592	386,129,743,485	0.865871755
	2017	358,974,051,474	428,884,879,225	0.836993955
WIIM	2015	131,081,111,587	177,962,941,779	0.736564086
	2016	106,290,306,868	136,662,997,252	0.777754835
	2017	40,589,790,851	54,491,308,212	0.744885601

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai perencanaan pajak tidak selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, tetapi ada juga yang mengalami penurunan. Nilai perencanaan pajak diperoleh dari hasil perhitungan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) dengan membagi laba bersih dengan laba sebelum pajak. Pada perhitungan perencanaan pajak nilai laba bersih dan laba sebelum pajak tidak boleh mengalami kerugian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil perhitungan yang didapat akan diolah menggunakan SPSS 20.

4.2.3 Manajemen Laba

Manajemen laba diperoleh dengan rumus manajemen laba yang diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba (Phillips et al., 2003) dalam Sumomba (2012). Dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini:

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Tabel 4.5
Manajemen Laba
(dalam rupiah)

Kode Emiten	Tahun	Net Income _{it}	Net Income (t-1)	Market Value of Equity (MVE (t-1))	Manajemen Laba
AMFG	2015	341,346,000,000	464,152,000,000	217,000,000,000	-0.565926267
	2016	260,444,000,000	341,346,000,000	217,000,000,000	-0.372820276
	2017	38,569,000,000	260,444,000,000	217,000,000,000	-1.022465438
CEKA	2015	106,549,446,980	41,001,414,954	148,750,000,000	0.440659039
	2016	249,697,013,626	106,549,446,980	148,750,000,000	0.962336582
	2017	107,420,886,839	249,697,013,626	148,750,000,000	-0.956478163
CINT	2015	29,477,807,514	26,065,329,538	100,000,000,000	0.03412478
	2016	20,619,309,858	29,477,807,514	100,000,000,000	-0.088584977
	2017	29,648,261,092	20,619,309,858	100,000,000,000	0.090289512
DPNS	2015	9,859,176,172	14,528,830,097	82,782,488,000	-0.056408717
	2016	10,009,391,103	9,859,176,172	82,782,488,000	0.001814574
	2017	5,963,420,071	10,009,391,103	82,782,488,000	-0.048874721
EKAD	2015	47,040,256,456	40,985,863,205	34,938,750,000	0.173285915
	2016	90,685,821,530	47,040,256,456	34,938,750,000	1.249202249

	2017	76,195,665,729	90,685,821,530	34,938,750,000	-0.414730229
SKLT	2015	20,066,791,849	16,855,973,113	69,074,050,000	0.046483719
	2016	20,646,121,074	20,066,791,849	69,074,050,000	0.008387075
	2017	22,970,715,348	20,646,121,074	69,074,050,000	0.033653655
MYOR	2015	1,250,233,128,560	409,618,689,484	447,173,994,500	1.879837489
	2016	1,388,676,127,665	1,250,233,128,560	447,173,994,500	0.309595372
	2017	1,630,953,830,893	1,388,676,127,665	447,173,994,500	0.54179739
TCID	2015	544,474,278,014	175,828,646,432	100,533,333,500	3.666899512
	2016	162,059,596,347	544,474,278,014	100,533,333,500	-3.803859559
	2017	179,126,382,068	162,059,596,347	100,533,333,500	0.169762457
KBLI	2015	115,371,098,970	72,026,856,790	655,123,510,700	0.06616194
	2016	334,338,838,592	115,371,098,970	655,123,510,700	0.334238866
	2017	358,974,051,474	334,338,838,592	655,123,510,700	0.037603921
WIIM	2015	131,081,111,587	112,673,763,260	209,987,376,000	0.087659309
	2016	106,290,306,868	131,081,111,587	209,987,376,000	-0.118058548
	2017	40,589,790,851	106,290,306,868	209,987,376,000	-0.312878409

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai manajemen laba tidak selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, tetapi ada juga yang mengalami penurunan. Nilai manajemen laba diperoleh dari hasil rumus pendekatan distribusi laba dengan cara laba bersih tahun berjalan dikurang laba bersih tahun sebelumnya dan dibagi nilai kapitalisasi pasar.

4.2.4 Rekapitulasi Data Angka

Hasil nilai rekapitulasi data diatas, menjadi laporan keuangan yang akan masuk dalam variabel penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6

Rekapitulasi Data Angka

Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak Tangguhan	Perencanaan Pajak	Manajemen Laba
AMFG	2015	-0,00266692	0,73524274	-0,56592627
	2016	0,00194952	0,74719776	-0,37282028
	2017	-0,00271268	0,60653572	-1,02246544
CEKA	2015	0,00056468	0,74891708	0,44065904
	2016	0,02599850	0,87359235	0,96233658
	2017	0,00142043	0,75016713	-0,95647816
CINT	2015	0,00209188	0,72316296	0,34124779
	2016	0,00433517	0,73188419	-0,08858498
	2017	-0,00049203	0,77372478	0,09028951
DPNS	2015	0,00193187	0,83326187	-0,05640872
	2016	0,00290242	0,81456259	0,00181457
	2017	0,00160692	0,75227670	-0,04887472
EKAD	2015	-0,00265973	0,70943210	0,17328591
	2016	0,00121445	0,76561050	1,24920225
	2017	0,00285902	0,74229107	-0,41473023
SKLT	2015	0,00388971	0,73300034	0,04648372
	2016	0,00497644	0,82039067	0,00838707
	2017	0,00068842	0,83924884	0,03365365
MYOR	2015	0,00037151	0,76210735	1,87983749
	2016	-0,00161125	0,75239135	0,30959537
	2017	-0,00153199	0,74578870	0,54179739
TCID	2015	-0,00013965	0,93372283	3,66689951
	2016	-0,00235286	0,73172579	-3,80385956
	2017	0,00443980	0,73689377	0,16976246
KBLI	2015	0.000775756	0.768889354	0.06616194
	2016	0.020452665	0.865871755	0.334238866
	2017	0.000143512	0.836993955	0.037603921

WIIM	2015	0,00410761	0,73656409	0,08765931
	2016	0,00088654	0,77775483	-0,11805855
	2017	0,00187563	0,74488560	-0,31287841

4.3 Analisis Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010, h. 206). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data seperti nilai mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi (Priyatno, 2016, h. 9).

Tabel 4.7
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Beban Pajak Tangguhan	30	-.00271	.02600	.0024158	.00612273
Manajemen Laba	30	-3.80386	3.66690	.0790903	1.13327916
Perencanaan Pajak	30	.60654	.93372	.7709921	.06128853
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Hasil olah data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan informasi sebagai berikut:

1. Hasil statistik deskriptif variabel beban pajak tangguhan dari jumlah sampel (N) 30 memiliki nilai minimum sebesar -0.00271, nilai maksimum sebesar 0.02600, nilai *mean* sebesar 0.0024158, dan standar deviasi sebesar 0.00612273.
2. Hasil statistik deskriptif variabel perencanaan pajak dari jumlah sampel (N) 30 memiliki nilai minimum sebesar 0.60654, nilai maksimum sebesar 0.93372, nilai *mean* sebesar 0.7709921, dan standar deviasi sebesar 0.06128853.

- Hasil statistik deskriptif variabel manajemen laba dari jumlah sampel (N) 30 memiliki nilai minimum sebesar -3.80386, nilai maksimum sebesar 3.66690, nilai *mean* sebesar 0.0790903, dan standar deviasi sebesar 1.13327916.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal sehingga data layak untuk diuji secara statistik. Dalam penelitian ini untuk menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak menggunakan metode *One Kolmogorov-Smirnov Test*, dimana jika nilai signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2016, h. 118).

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.96768269
	Absolute	.151
Most Extreme Differences	Positive	.144
	Negative	-.151
Kolmogorov-Smirnov Z		.826
Asymp. Sig. (2-tailed)		.502

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olah data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan hasil uji normalitas dengan metode *One Kolmogorov-Smirnov Test* mempunyai nilai signifikan sebesar 0.502, artinya nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas umumnya dengan melihat nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada hasil regresi linier. Apabila nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Priyatno, 2016, h. 129).

Tabel 4.9

Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.704	2.627		-2.932	.007		
	Beban Pajak Tangguhan	-11.994	34.528	-.065	-.347	.731	.776	1.289
	Perencanaan Pajak	10.133	3.449	.548	2.938	.007	.776	1.289

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Hasil olah data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.9 nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) merupakan nilai yang bisa menunjukkan ada tidaknya multikolinearitas. Nilai *Tolerance* harus berada diantara 0 hingga 1. Nilai VIF juga harus memperlihatkan angka kurang dari 10. Pada tabel 4.9 memperlihatkan angka *Tolerance* diantara 0 hingga 1 yaitu sebesar 0.776. angka VIF memperlihatkan nilai kurang dari 10 untuk setiap variabelnya yaitu sebesar 1.289. Informasi ini memberikan bukti empiris bahwa seluruh variabel independen meliputi beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tidak terjadi multikolinearitas. Salah satu syarat uji regresi linier berganda telah terpenuhi.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

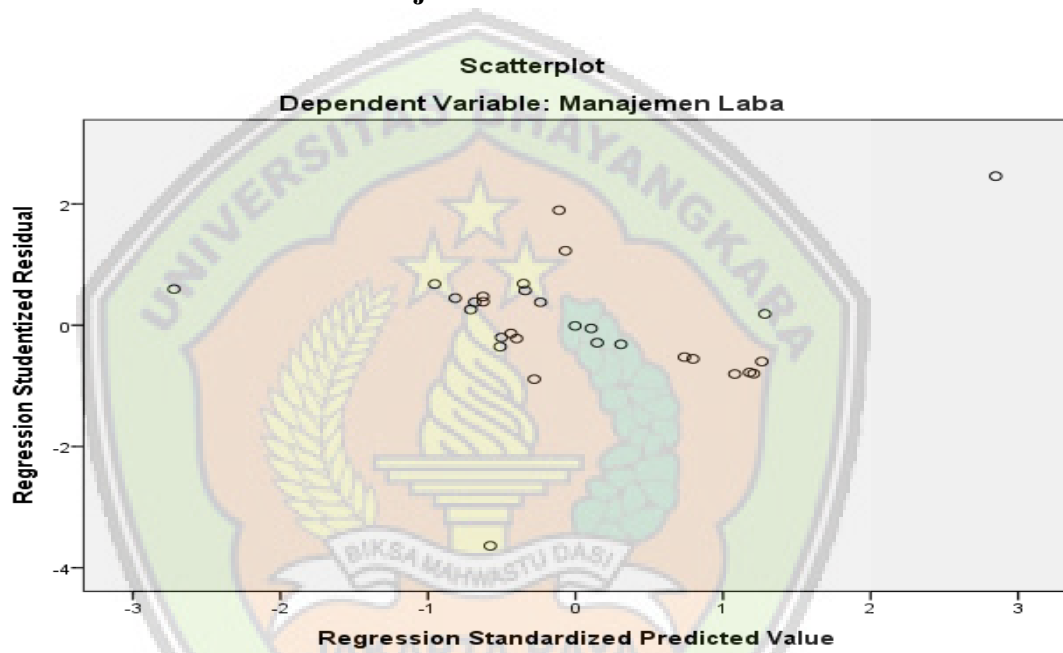
Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak

adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplot* regresi.

Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan melihat *scatterplot* yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi (Priyatno, 2016, h. 131).

Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil olah data SPSS 20

Dasar analisis uji heteroskedastisitas dengan grafik plot adalah jika titik-titik dalam grafik tersebar (tidak membuat pola) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada tidak membentuk pola yang teratur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah

autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

- $DU < DW < 4-DU$, maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi).
- $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$, maka H_0 ditolak (terjadi autokorelasi).
- $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, maka tidak ada keputusan yang pasti (Priyatno, 2016, h. 139).

Tabel 4.10

Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.520 ^a	.271	.217	1.00288258	2.478

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Hasil olah data SPSS 20

DL : 1.2837

DU : 1.5666

DW : 2.478

Keterangan :

$4 - DU < DW < 4 - DL$

$4 - 1.5666 < 2.478 < 4 - 1.2837$

$2.4334 < 2.478 < 2.7163$

Dari hasil output diatas dapat diketahui nilai DW sebesar 2.478 karena nilai DW terletak antara $4 - DU$ dan $4 - DL$ ($2.4334 < 2.478 < 2.7163$), maka dapat disimpulkan tidak ada keputusan yang pasti.

4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis

regresi linier berganda juga untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Priyatno, 2013, h. 116).

4.3.3.1 Uji Koefisien Regresi (b)

Koefisien regresi (b) adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas (X), semakin besar nilai koefisien regresi maka kontribusi perubahan juga semakin besar, dan sebaliknya akan semakin kecil. Kontribusi perubahan variabel bebas (X) juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif (Sunyoto, 2011, h. 9).

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
	(Constant)	-7.704	2.627	
1	Beban Pajak Tangguhan	-11.994	34.528	-.065
	Perencanaan Pajak	10.133	3.449	.548

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Hasil olah data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai $a = -7.704$, $b_1 = -11.994$, dan $b_2 = 10.133$. Nilai a merupakan besarnya nilai Y apabila X_1 dan $X_2 = 0$, sedangkan nilai b adalah nilai koefisien regresi dari X_1 dan X_2 . Maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -7.704 - 11.994 X_1 + 10.133 X_2$$

Konstanta sebesar -7.704 , jika beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dianggap nilainya sama dengan 0 (nol), maka manajemen laba nilainya sebesar -7.704 .

Koefisien regresi variabel beban pajak tangguhan sebesar -11.994 artinya jika nilai variabel independen lain tetap dan beban pajak tangguhan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka manajemen laba akan menurun sebesar 11.994. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba, dimana semakin meningkat beban pajak tangguhan maka semakin menurun manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Koefisien regresi variabel perencanaan pajak sebesar 10.133 artinya jika nilai variabel independen lain tetap dan perencanaan pajak ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka manajemen laba akan meningkat sebesar 10.133. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara perencanaan pajak dengan manajemen laba, dimana semakin meningkatnya perencanaan pajak maka semakin meningkat juga manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

4.3.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. R^2 yang sedikit artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan sebaliknya apabila nilai yang mendekati 1 (satu) artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013, h. 97).

Tabel 4.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.271	.217	1.00288258

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Hasil olah data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.12 diatas yaitu diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.217 atau 21.7% yang berarti bahwa variabel independen (beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak) mempengaruhi variabel dependen (manajemen laba) sebesar 21.7% dan sisanya sebesar 78.3% oleh variabel lain di luar penelitian.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Tabel 4.13

Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-7.704	2.627		-2.932	.007
1	Beban Pajak Tangguhan	-11.994	34.528	-.065	-.347	.731
	Perencanaan Pajak	10.133	3.449	.548	2.938	.007

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Hasil olah data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai signifikan variabel beban pajak tangguhan sebesar 0.731 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima, artinya beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap penurunan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai signifikan variabel perencanaan pajak sebesar 0.007 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak, artinya perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik perusahaan

dalam melakukan perencanaan pajak, maka manajemen laba yang diterapkan dalam perusahaan juga semakin baik.

4.3.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dan F_{tabel} .

Tabel 4.14

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.089	2	5.045	5.016	.014 ^b
	Residual	27.156	27	1.006		
	Total	37.245	29			

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

b. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan

Sumber: Hasil olah data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.014 yang berarti bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0.014 < 0.05$). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak, artinya beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan kata lain, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen untuk memaksimalkan laba.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima. Dengan kata lain, menerima hipotesis nol (H_{o1}) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, artinya semakin rendah beban pajak tangguhan maka manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin rendah.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2015), Fitriany (2016), dan Setyawan (2016) yang menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

4.4.2 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Dengan kata lain, menerima hipotesis alternatif (H_{a2}) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, artinya semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin tinggi pula manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santana (2016) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap adanya praktik manajemen laba.

4.4.3 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak. Dengan kata lain, menerima hipotesis alternatif (H_{a3}) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen untuk memaksimalkan laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumomba (2012) dan Negara (2017) yang menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat mendeteksi adanya praktik manajemen laba.